

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI,  
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN *GOOD  
GOVERNMENT GOVERNANCE*  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING



**TESIS**

Diajukan Kepada Pengelola  
Program Pasca Sarjana Magister Manajemen  
STIE Bank BPD Jateng untuk memenuhi syarat guna  
Memperoleh derajat S-2 Magister Manajemen

Oleh :

SETIASIH  
NIM. 22211145

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
STIE BANK BPD JATENG  
SEMARANG  
2023**

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI,  
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN *GOOD  
GOVERNMENT GOVERNANCE*  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

**TESIS**

Oleh :

SETIASIH  
NIM. 22211145

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Magister Manajemen STIE Bank BPD Jateng

Semarang, 25 Agustus 2023

Pembimbing

Dr. Fitri Lukiastuti, S.E., M.M  
NIDN.0611126901

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : SETIASIH  
Tesis Berjudul : PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI,  
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
DENGAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
NIM : 22211145  
Program Studi : Magister Manajemen

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 25 Agustus 2023  
dan dinyatakan lulus serta memenuhi syarat untuk diterima.

Susunan Dewan Penguji :

Dewan Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr. Fitri Lukiastuti, S.E., M.M  
NIDN.0611126901
2. Dr. Dra. Widhy Setyowati, M.M. Akt. CA  
NIDN. 0603036102
3. Dr. Dwi Suryanto Hidayat, SE, MM  
NIDN. 0017037601

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi Magister Manajemen

Dr. Fitri Lukiastuti, S.E., M.M  
NIDN.0611126901



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : SETIASIH  
NIM : 22211145

Menyatakan bahwa TESIS dengan judul:

“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan *Good Government Governance* Sebagai Variabel Intervening”

Adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana maupun Master di STIE Bank BPD Jateng atau Perguruan Tinggi lain dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya mengakui bahwa karya Tesis ini dapat dihasilkan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing Dr. Fitri Lukiastruti, S.E., M.M

Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2023

SETIASIH  
NIM. 22211145

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT. Kepada-Nya kita memuji dan bersyukur, memohon pertolongan dan ampunan. Kepada-Nya pula kita memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan yang selalu menghembuskan kebatilan pada diri kita. Shalawat serta salam peneliti sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana STIE Bank BPD Jateng Semarang. Berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penyusunan tesis ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu ijinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Taofik Hidajat, S.E., M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng Semarang.
2. Dr. Fitri Lukiastuti, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng Semarang dan selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan petunjuk dan saran yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
3. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memotivasi penyusunan tesis ini.

Berkaitan dengan penyusunan tesis ini, peneliti menyadari dan mengakui bahwa penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bagi para pembaca atau siapapun yang berkenan untuk menyampaikan saran dan kritiknya. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya sebagai tambahan wawasan kajian ilmu pengetahuan. Tesis ini juga diharapkan dapat memberikan kekayaan kepustakaan Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana STIE Bank BPD Jateng Semarang

Semarang, 25 Agustus 2023

SETIASIH  
NIM. 22211145

## **HALAMAN MOTTO**

- ❖ Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya. Karena hasil direkayasa dan dibeli. Sedangkan proses selalu jujur menggambarkan siapa diri kita sebenarnya.
- ❖ Belajarlah dari kekeliruan di jaman lalu, mencoba bersama cara yang berbeda, dan senantiasa berharap untuk sebuah kesuksesan di jaman depan.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan tesis ini untuk:

- ❖ Suami dan Anak-anakku tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dalam menggapai cita-citaku, terus memberikan semangat yang tinggi untuk berjuang dan terus berjuang tanpa kenal lelah.
- ❖ Almamaterku Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng yang saya banggakan.



## **ABSTRACT**

*The research objective is to determine the influence of accounting information systems and human resource competence on the quality of regional financial reports; knowing the influence of accounting information systems and human resource competence on good government governance; knowing the influence of good government governance on the quality of financial reports; determine the mediation of good government governance on the influence of accounting information systems on the quality of regional financial reports and on the influence of human resource competence on the quality of regional financial reports.*

*The research population is 25 Regional Work Units (SKPD) in Batang Regency. The sampling technique uses purposive sampling with criteria namely civil servants and non-civil servants, who play a role in preparing financial reports, as well as employees who are directly involved in the accounting information system. The planned sample size target is 75 respondents consisting of PPK (Financial Administration Officials), Agency Treasurers & Accounting Officers in 25 Regional Work Units (SKPD) of Batang Regency.*

*The results of the research are that accounting information systems and human resource competence have a significant positive effect on the quality of regional financial reports; accounting information systems have no effect on good government governance; human resource competency has a significant positive effect on good government governance; good government governance has no effect on the quality of regional financial reports; good government governance is unable to mediate the accounting information system on the quality of regional financial reports and the influence of human resource competence on the quality of regional financial reports.*

*Keywords : Quality of Financial Statements; Good Government Governance; Accounting Information Systems and Human Resources Competency*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian yakni mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah; mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap *good government governance*; mengetahui pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan; mengetahui mediasi *good government governance* pada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Populasi penelitian yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Batang sebanyak 25 Satuan Kerja. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yakni pegawai PNS dan non PNS, berperan dalam mempersiapkan laporan keuangan, serta pegawai yang terlibat langsung dalam sistem informasi akuntansi. Target jumlah sampel yang direncanakan sebanyak 75 responden terdiri dari PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Instansi & Petugas Akuntansi pada 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang.

Hasil penelitian yakni sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah; sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap *good government governance*; kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap *good government governance*; *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah; *good government governance* tidak mampu memediasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan; *Good Government Governance*; Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	6
2.1 Telaah Pustaka .....	6
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	6
2.1.2 Teori Kepatuhan .....	6
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	7
2.1.4 <i>Good Government Governance</i> .....	8
2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi .....	9
2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	10
2.2 Model Penelitian .....	10
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	11
2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	11
2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	11
2.2.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	12
2.2.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	12
2.2.5 Pengaruh <i>Good Government Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	12

2.2.6	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	13
2.2.7	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	13
BAB III	METODE PENELITIAN .....	15
3.1	Metode Pengumpulan Data .....	15
3.2	Populasi dan Metode Penentuan Sampel .....	15
3.3	Data dan Sumber Data .....	16
3.3.1	Variabel Penelitian .....	16
3.3.2	Definisi Operasional Variabel .....	17
3.4	Teknik Analisis Data .....	18
3.4.1	Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	18
3.4.2	Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	19
3.4.3	Uji Hipotesis (Uji t) .....	19
3.4.4	Uji Mediasi .....	19
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1	Identitas Responden .....	20
4.1.1	Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin .....	21
4.1.2	Identitas Berdasarkan Umur .....	21
4.1.3	Identitas Berdasarkan OPD Tempat Bekerja .....	21
4.1.4	Identitas Berdasarkan Masa Kerja .....	23
4.2	Statistik Deskriptif .....	23
4.2.1	Kualitas Laporan Keuangan .....	24
4.2.2	<i>Good Government Governance</i> .....	25
4.2.3	Sistem Informasi Akuntansi .....	25
4.2.4	Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	26
4.3	Perhitungan Model Pengukuran .....	26
4.3.1	Uji Validitas .....	27
4.3.2	Uji Reliabilitas .....	28
4.3.3	Hasil Output Model Pengukuran .....	28
4.4	Perhitungan Model Struktural .....	29
4.4.1	Pengujian Pengaruh Langsung .....	29
4.4.2	Perhitungan Hipotesis Mediasi .....	30
4.4.3	Koefisien Determinasi .....	30
4.4.4	Hasil Output Model Struktural .....	31
4.5	Pembahasan .....	31

BAB V	KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN .....	37
5.1	Kesimpulan .....	37
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	37
5.3	Saran .....	37
BAB VI	IMPLIKASI MANAJERIAL .....	39
DAFTAR PUSTAKA		

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	17
Tabel 4.1 Data Sampel Peneitian .....	20
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden .....	21
Tabel 4.3 Umur Responden .....	21
Tabel 4.4 OPD Tempat Bekerja Responden .....	21
Tabel 4.5 Masa Kerja Responden .....	23
Tabel 4.6 Perhitungan Kualitas Laporan Keuangan .....	24
Tabel 4.7 Perhitungan <i>Good Government Governance</i> .....	25
Tabel 4.8 Perhitungan Sistem Infromasi Akuntansi .....	25
Tabel 4.9 Perhitungan Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	26
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji Validitas .....	27
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas .....	28
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis Langsung .....	29
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis Mediasi .....	30
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi .....	30

## DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1 Model Penelitian .....	11
Gambar 2 Hasil Output Gambar Model Pengukuran .....	28
Gambar 3 Hasil Output Gambar Model Struktural .....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	44
Lampiran 2 Jawaban Kuesioner Penelitian .....	50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menjadi kewajiban pemerintah sebagai pengelola keuangan negara untuk menyusun laporan keuangan termasuk juga pemerintah daerah Kabupaten / Kota. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya- tidaknya terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. ( PP Nomor 8 Tahun 2006 ).

Laporan Keuangan pemerintah harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan demikian, Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (unaudited financial statements). Sebagaimana lazimnya, Laporan Keuangan tersebut setelah diperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh SAP. Laporan Keuangan yang telah diperiksa dan diperbaiki akan diusulkan pemerintah pusat/daerah dalam rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui DPR/DPRD. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). ( Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Untuk memperoleh Opini WTP dari BPK, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan haruslah berkualitas, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari beberapa kriteria yakni Dapat dipahami, Relevansi, Keandalan, dan Dapat diperbandingkan (Standar Akuntansi Keuangan, 1999 ; 9).

Namun demikian sampai dengan saat ini masih saja terdapat temuan dalam kaitannya dengan pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota bahkan dengan perolehan Opini WTP sekalipun. Sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2022 yang merupakan ikhtisar dari 388 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya dijumpai hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 177 hasil pemeriksaan kinerja, dan 210 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) – kepatuhan. Pada Pemerintah daerah kabupaten Batang pada tahun 2022 mendapat pemeriksaan DTT (Dengan Tujuan Tertentu) dengan masih adanya temuan dan perlu perbaikan diantaranya adalah Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai, Realisasi Belanja Penerangan Jalan, Bukti Pertanggungjawaban Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Menurut Sumaryati, Novitasari & Machmudah (2020) suatu instansi harus memiliki kualitas sistem informasi, khususnya sistem informasi akuntansi. SIA bertujuan untuk menunjukkan informasi keuangan yang berkualitas baik dan terpercaya. Dengan memiliki kualitas sistem informasi akuntansi, pemerintah daerah bisa menunjukkan laporan keuangan yang akurat & dapat dipercaya, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik.(Iwan, C. 2022).

Ridzal, Sujana, & Malik (2022) dan .(Iwan, C. 2022) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Namun perbedaan hasil diperoleh oleh penelitian serta Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor lainnya yang dapat berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dalam pengelolaan laporan keuangan merupakan faktor kunci terciptanya integritas keuangan. Menurut Sundari & Rahayu, (2019) laporan keuangan disusun memerlukan sumber daya manusia yang bisa memahami proses akan pelaksanaan akuntansi dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten juga bisa memberikan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik bagi organisasi.

Penelitian yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan telah dilaksanakan oleh (Sundari & Rahayu, 2019) dan (Gasperz, 2019) yang memperoleh hasil pada kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Zahira H, K. (2021). Hidayati, R., & Kinasih, H. W. (2023). Namun hasil tersebut tidak konsisten akan penelitian Sriyono, (2020) (Hasanah & Siregar, 2021) yang mendapatkan hasil bahwa tidak berpengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan yang baik juga perlu adanya *good government governance*. Menurut Azzindani & M. Irwan, (2020) *Good Governance Governance (GGG)* memberikan peran penting akan penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi akan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi peran penting untuk menjukkkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Azzindani & M. Irwan, (2020) dan STIBIS, R. A. (2023). menemukan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penerapan prinsip-prinsip *good government governance*, penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah berkualitas namun berbeda hasilnya dengan penelitian Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023) bahwa *good government governance* tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini berawal dari penelitian Mursida, S., & Setiyono, W. P. (2021). *The Effect of the Application of Government Accounting Standards, Apparatus Competence, the Role of Internal Audit and the Internal Control System on the Quality of Information on Local Government Financial Statements*. Secara spesifik penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu *good government governance* yang diambil dari penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) dan Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023) untuk menguji hubungan antara pengaruh sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian yaitu pengaruh sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara untuk pengaruh sistem informasi akuntansi juga terdapat perbedaan antara Ridzal, Sujana, & Malik (2022) dan (Iwan, C. 2022) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Namun perbedaan hasil diperoleh oleh penelitian serta Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, (Sundari & Rahayu, 2019) dan (Gasperz, 2019) Zahira H, K. (2021). Hidayati, R., & Kinasih, H. W. (2023) memperoleh hasil pada kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Sriyono, (2020) dan (Hasanah & Siregar, 2021) tidak berpengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) dan Stibis, R. A. (2023) menyimpulkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023) menyimpulkan bahwa *good government governance* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan terdapat perbedaan hasil. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang, “*Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Government Governance sebagai variabel Intervening*” (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang).

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi tentang beberapa pertanyaan yang diajukan dalam suatu penelitian. Beberapa pertanyaan yang berhasil dihimpun berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap *good government governance*?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance*?
5. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
6. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
7. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tentang beberapa pernyataan yang disesuaikan dengan perumusan masalah yang diajukan. Beberapa pernyataan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Untuk mengetahui sejauh mana Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Untuk mengetahui sejauh mana Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap *good government governance*?
4. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance*?
5. Untuk mengetahui sejauh mana *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
6. Untuk mengetahui sejauh mana *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
7. Untuk mengetahui sejauh mana *good government governance* mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Uraian kedua manfaat ini dapat dijelaskan secara lengkap yakni sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan audit internal, sistem informasi akuntansi, kemampuan Sumber daya manusia dan *good government governance*, serta kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ilmu ekonomi dan bisnis utamanya ilmu manajemen keuangan pemerintahan di daerah kab/kota.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana belajar aplikatif terhadap teori-teori yang telah diajarkan dalam perkuliahan sehingga dapat menghasilkan temuan yang nyata dalam dunia kerja sebagai hasil riset dan telaah data.

##### b. Bagi obyek yang diteliti

Dapat menjadi nilai tambah bagi tim manajemen instansi tempat penelitian sehingga bisa menjadi masukan untuk hal – hal perbaikan manajemen untuk menggapai tujuan organisasi secara tepat guna, tepat sasaran dan secara efektif serta efisien serta dapat menjadi sumber informasi yang akurat dalam membantu memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi untuk perbaikan secara terus menerus.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Telaah Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan atau *agency theory* menurut Jensen, MC, & Meckling dalam Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) agensi dapat didefinisikan sebagai hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana terdapat dua atau lebih individu dalam suatu kelompok organisasi. Dalam agensi, pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal.

Menggunakan teori ini dijelaskan adanya hubungan antara masyarakat menjadi prinsipal dan pemerintah menjadi agen (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah 2020). Dalam hal ini pemerintah bertindak menjadi agen mempunyai keharusan menyampaikan informasi yang berguna untuk pemegang laporan keuangan yang bertindak menjadi principal untuk menilai akuntabilitas pemerintah dan melakukan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Mardiasmo, (2018) akuntabilitas publik dijelaskan untuk kewajiban bagi pihak yang memegang kepercayaan atau agent, dan dapat pertanggungjawaban serta melaporkan atas aktivitas akan pihak pemberi kepercayaan atau principal. Principal mendapatkan hak untuk meminta pertanggungjawaban dari agent tersebut.

Konsep akuntabilitas publik terdapat dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal terkait dengan pertanggungjawaban akan pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan pertanggungjawaban pada masyarakat luar.

Masalah yang menjelaskan praktik keagenan dan keuangan untuk organisasi sektor publik adalah desain yang didasarkan pada teori keagenan. Laporan keuangan digunakan pemerintah yang menjadi agen memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang menguntungkan bagi pengguna laporan keuangan dan masyarakat sebagai prinsipal. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah dan membantu pengambilan keputusan, baik politik, sosial, maupun ekonomi, secara langsung atau tidak langsung melalui wakilnya. Keterkaitan keagenan akan pemerintahan yang demokratis digambarkan dengan keterkaitannya pemerintah dan setiap pengguna informasi keuangan (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, 2020).

##### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan adalah teori yang menyatakan bahwa setiap instansi berkewajiban untuk mematuhi peraturan karena pembuat undang-undang memiliki hak untuk mendikte perilaku (normatif melalui legitimasi/komitmen normatif melalui legitimasi). Menurut Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya di bidang sosiologi dan psikologi, yang lebih menitikberatkan pada perlunya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Ada dua perspektif dalam teori kepatuhan, yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental melibatkan seseorang yang sepenuhnya didorong oleh keutamaan individu dan reaksi akan perubahan situasi atau kondisi. Perspektif normatif, di sisi lain, melibatkan norma sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan standar masyarakat, sedangkan perspektif normative adalah perspektif yang berhubungan dengan moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Berdasarkan perspektif normatif, teori kepatuhan harus diterapkan dalam akuntansi (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, 2020). Teori kepatuhan menekankan pada pengaruh suatu proses sosialisasi untuk mempengaruhi integritas kepatuhan seseorang atau individu itu sendiri. Dilihat dari perspektif normative dalam teori kepatuhan, teori ini dapat diterapkan pada aspek akuntansi. Kepatuhan suatu instansi atau lembaga pelapor untuk melaksanakan laporan pertanggungjawaban (Shintia & Erawati, 2017).

### 2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:1) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas laporan keuangan dalam memberikan informasi. Tujuan dari misi tentang kondisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) , laporan keuangan dalam PSAP 01 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya. Nilai dari informasi ditentukan oleh lima hal yaitu:

1. Untuk memperoleh pemahaman dan manfaat.
2. Untuk mendapatkan pengalaman.
3. Pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diterapkan untuk memecahkan suatu masalah atau proses bisnis tertentu.
4. Refleksikan pengalaman masa lalu yang mengekstrak makna signifikan dan memberikan pengetahuan yang terorganisir dan bernilai tinggi. Nilai ini dapat mencegah manajer melakukan kesalahan yang sama yang telah dilakukan manajer lain sebelumnya.
5. Informasi dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih besar daripada biaya untuk mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak berharga, tetapi nilai kegunaannya dapat diapresiasi. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran preskriptif yang harus terkandung dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Adha, D. R. (2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Relevan  
Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, itu berarti pemerintah sudah mampu untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang dihasilkan akan terbebas dari kesalahan yang menyimpang. Para pengguna laporan keuangan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan dari informasi yang didapat. Sebaliknya, apabila nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan karakteristik yang disyaratkan maka akan menimbulkan permasalahan.

#### 2.1.4 *Good Government Governance*

*Good government governance* (GGG) sebagaimana didefinisikan oleh World Bank di dalam Mardiasmo, (2018) yaitu: “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Artinya suatu cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo, (2018) mendefinisikan *good government governance* sebagai: “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.



Menurut Azzindani & M. Irwan, (2020) *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu, sehingga *good government governance* berperan penting dalam meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Menurut Saragih, (2014) Prinsip-prinsip *good government governance* tersebut dalam akuntansi sektor publik berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik yaitu:

1. Partisipasi
2. Akuntabilitas
3. Integritas

#### 2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus menggunakan sistem informasi akuntansi. Terdapat berbagai pandangan mengenai definisi dari sistem informasi akuntansi, salah satunya Bornard dan Hopwood dalam Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan teknologi informasi, prosedur, dan kebijakan yang digunakan oleh sebuah entitas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu. Menurut Daud & Windana, (2014) Terdapat beberapa cara atau langkah dalam penyusunan sistem informasi akuntansi, di antaranya:

1. Sistem informasi akuntansi mempunyai kecepatan, yaitu dapat menampilkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu, serta memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Sistem informasi akuntansi mempunyai keamanan, artinya sistem informasi dapat membantu jaminan keamanan aset perusahaan atau aset daerah.
3. Sistem informasi akuntansi mempunyai efisiensi biaya, yang artinya biaya untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi dapat ditekan agar tidak terlalu mahal.

Menurut Marshall B. Romney & Paul John Steinbart (2015:10), bahwa sistem informasi akuntansi adalah: “Sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.” Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses dan mengumpulkan data serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Komponen Sistem Informasi Akuntansi Menurut Azhar Susanto (2008:16) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah terintegrasi dan harmonisasi antara komponen-komponen sistem informasi akuntansi yang diantaranya *hardware*, *software*, *brainware*, prosedur, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data. Sistem Informasi Akuntansi yang baik harus memiliki kriteria seperti di bawah ini:

- Keamanan – Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang.
- Kerahasiaan – Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah.
- Integritas pemrosesan – Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat.
- Ketersediaan – Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak.

#### 2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata kompeten rata. Penentu ambang si yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Kadek Desiana Wati dkk : 2015).

Byham et al., (1996) dalam Efendi, (2019) kompetensi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perilaku spesifik yang diperlukan dan dapat diandalkan oleh seseorang untuk mencapai target perusahaan dan sukses dalam melaksanakan peran mereka. Selanjutnya, konsep kompetensi terdapat kombinasi perilaku antara pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik yang dibutuhkan agar individu dapat memainkan peran mereka pada organisasi secara efektif dan menghasilkan kinerja yang baik dengan tujuan organisasi.

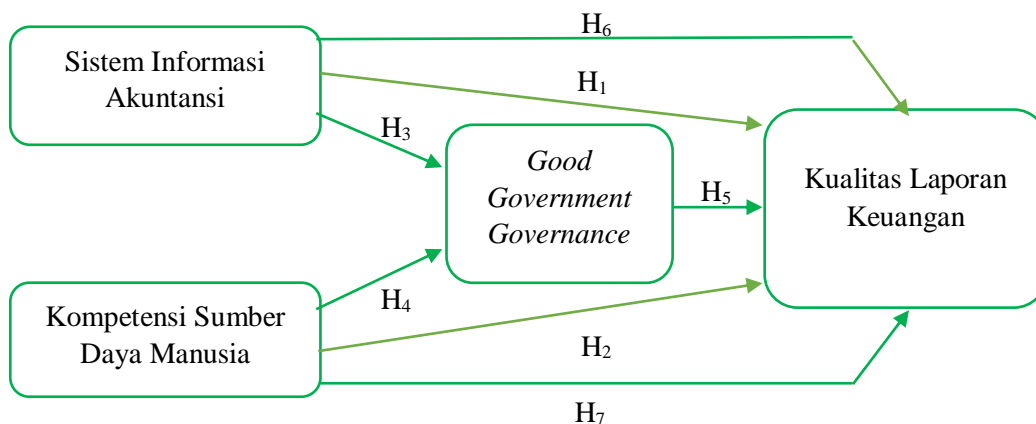
Kompetensi meliputi sejumlah atribut yang melekat pada individu sebagai kombinasi pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang dapat meningkatkan kinerja. Jika kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan sistem akuntansi yang diperlukan tidak memilikinya, hal itu dapat timbul hambatan akan pelaksanaan guna akuntansi, dan informasi akuntansi yang digunakan dari sistem akuntansi, menjadi buruk akan kualitasnya.

Spencer dan Spencer dalam Hutapea dan Thoha (2008:28) yang mengemukakan bahwa ada tiga komponen utama pembentuk kompetensi yaitu :

1. Pengetahuan (*knowledge*)
2. Keterampilan (*skill*)
3. Pengalaman (*experience*)

#### 2.2 Model Penelitian

Model penelitian atau kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Model penelitian dibuat dalam bentuk bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis yang menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel penelitian. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ridzal, Sujana, & Malik, (2022) Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023).menemukan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Maka penerapan sistem informasi yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk memperoleh opini WTP oleh badan pemeriksa keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

#### 2.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Gasperz, (2019) dalam penelitiannya menemukan hasil yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, (2020) serta Tawaqal & Suparno, (2019) dan Zahira H, K. (2021), Kabib, N., Hayati, S. N., & Fatimatuzzahra, S. (2021). Mursida, S., & Setiyono, W. P. (2021). Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023). Hal ini menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berhubungan searah dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia dapat memberikan kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

### 2.3.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap *Good Government Governance*

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem atau komponen yang terintegrasi baik secara fisik/non-fisik untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi organisasi dan pengambilan keputusan (Aguswen, Ridha, & Astuti 2020). Sistem informasi akuntansi sangat baik dilakukan sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan *good government governance* guna memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal transparansi atas laporan keuangan pemerintah daerah (Azzindani & M. Irwan, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wulan, (2020) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada *good government governance*. Hasil ini berarti bahwa pemerintah daerah yang mampu menciptakan sistem informasi akuntansi dengan baik dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H3 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap *Good Government Governance*

### 2.3.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap *Good Government Governance*

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kualitas pegawai yang akan menjalankan tanggung jawab yang diembankan, yang didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai (Darmawan & Darwanis, 2018). Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat meningkatkan *good government governance* dilingkungan pemerintah daerah. Azzindani & M. Irwan, (2020) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kinerja aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka semakin baik kinerja pemerintah akan menciptakan *good government governance* yang berintegritas dalam pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap *Good Government Governance*.

### 2.3.5 Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penerapan *Good Governance* and *Clean Governance* memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian yang diinginkan yaitu Partisipasi, Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban). Apabila suatu pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bersih dan berwibawa baik dari segi kepegawaian, susunan organisasi maupun fungsinya maka dikatakan menjalankan *Good Governance* and *Clean Governance*. Hasil tersebut didukung oleh penelitian (Safrin & Pratiwi, 2021) dan Amanda Thea Hosana, Rispantyo dan Bambang Widarno (2022) Safira, W. R., Sanjaya, S., &

Dewi, R. C. (2022) bahwa *good government Governance* berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut sejalan dengan Suryaningsum, & Suryono, (2020) serta Philadhelphia, Cahaya Putra & Romli, (2022) *Good government governance* berhubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Maka ketika penerapan *good government governance* pada pemerintah daerah semakin baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin berkualitas dan bahwa tata kelola keuangan yang baik yang berlandaskan tata pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) adalah pengelolaan keuangan yang memiliki dasar yang kuat, akuntabel, efisien dan efektif serta ditangani secara partisipatif dimana tata kelola yang kuat mampu memberi dampak menguntungkan dan lumayan banyak pada kualitas laporan keuangan. Menurut hasil penelitian sebelumnya, temuan hipotesis adalah :

H<sub>5</sub> : *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

#### 2.3.6 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem informasi akuntansi disebut sistem untuk memberikan sesuatu pada input yang baik, serta proses output yang baik agar bisa memberikan informasi untuk pemerintah (Tawaqal & Suparno, 2017). Menurut Azzindani & M. Irwan ( 2020 ) menjelaskan pengelola keuangan yang diangkat atau dipilih oleh atasannya bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka akuntabilitas publik guna mewujudkan *good government governance*.

Pada penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020 ) Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023). mendapatkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan yang dimediasi *good government governance*. Dengan keberadaan *governance good government* , sistem informasi akuntansi akan mampu memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal itu menunjukkan dengan adanya *governance good government* penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi yang baik mampu menjamin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H<sub>6</sub> : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui mediasi *Good Government Governance*

#### 2.3.7 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

*Good government governance* merupakan muara dari pelaksanaan otonomi daerah yang menghasilkan birokrasi yang andal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga sumber daya manusia mempengaruhi terselenggaranya *good government governance* yang menjadi isu sentral dalam pemerintahan. Azzindani & M. Irwan, (2020) Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023) dalam hasil penelitiannya *good government governance* dapat memediasi penuh pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Maka *good government*

secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah juga harus mereformasi diri dari kompetensi dalam pengetahuan serta pengalaman agar tercapai pemerintahan yang bersih dan transparan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H<sub>7</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui mediasi *Good Government Governance*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti memahami pengukuran variabel serta apa yang dapat diharapkan dari responden (Sugiyono, 2015).

#### **3.2 Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi suatu objek maupun subyek dengan jumlah serta spesifik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dan kemudian dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Batang. Populasi dalam penelitian ini akan dilakukan sebanyak 25 Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Sosial
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas P3AP2KB
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Sekretaris Dewan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Arsip dan Perpustakaan
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17. Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM
19. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
20. Inspektorat
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sampel merupakan sebagian dari kuantitas serta karakteristik dari keseluruhan populasi (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan sampel yaitu 75 responden yang terdiri dari PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Instansi & Petugas Akuntansi pada 25 (dua puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang. Penelitian ini dalam pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam menetapkan sampel penelitian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan supaya data penelitian yang didapatkan bisa lebih representative (Sugiyono, 2015). Kriteria penentuan sampel yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai berstatus PNS dan non PNS.
2. Berperan dalam mempersiapkan laporan keuangan pada instansi terkait.
3. Pegawai yang terlibat langsung dalam sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian maupun responden, baik individu atau kelompok (Chandarin, 2018). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Penyebaran kuesioner penelitian ini melalui survei kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Sragen terdapat 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

#### **3.3.1 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti dengan maksud akan dipelajari guna memperoleh informasi terkait suatu hal, yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan (Sugiyono, 2015). Adapun variabel dalam penelitian ini diantaranya:

1. Variabel Terikat (Dependen)  
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebuah akibat dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah (Y).
2. Variabel Bebas (Independen)  
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan dari timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015). Variabel bebas penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi (X1), dan kompetensi sumber daya manusia (X2).
3. Variabel Intervening/Mediasi  
Variabel intervening (penghubung) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2015). Variabel mediasi dari penelitian ini adalah good government governance (Z).



### 3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan (PP No 71 Tahun 2010)	Relevan	Sesuai SAP	Skala likert 1 – 5
			Tepat waktu	
		Andal	Mampu memprediksi	
			Berpihak pada kebutuhan	
		Dapat dibandingkan	Korektif	
			Kesimpulan berbeda	
Dapat dipahami	Berguna bagi pengambilan keputusan			
	Mudah dipahami			
2	<i>Good Government Governance</i> (Saragih, 2014)	Partisipasi	Partisipasi masyarakat	Skala likert 1 – 5
			Masukan masyarakat	
		Akuntabilitas	Masyarakat menilai	
			Siap diaudit	
		Integritas	Kepentingan publik	
			Menggunakan aturan	
Menggunakan kebijakan				
3	Sistem Informasi Akuntansi (Azhar Susanto, 2008)	Keamanan	Dilengkapi <i>password</i>	Skala likert 1 – 5
			Tidak mudah diakses	
			Tidak mudah diubah	
		Kerahasiaan	Hanya admin yang mengetahui	
			Klasifikasi transaksi	
		Integritas pemrosesan	Analisis transaksi	
			Identifikasi pencatatan	
			Bukti transaksi	
			Pencatatan kronologis	
		Ketersediaan	Akomodir semua transaksi	
Proses penatausahaan				
Pelaporan integral				

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia (Hutapea dan Thoha, 2008)	Pengetahuan	Proses akuntansi	Skala likert 1 – 5
			APBD	
			Prinsip-prinsip akuntansi	
		Keterampilan	Mematuhi kewajiban	
			Memahami struktur organisasi	
		Pengalaman	Sosialisasi	
Efektivitas				

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali, (2015) *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang powerful oleh karena itu tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar. Tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

#### 3.4.1 Instrumen Penelitian

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui survey lapangan dengan menggunakan kuesioner. Modifikasi skala likert digunakan dalam mengukur pendapat dari responden menggunakan empat alternatif jawaban sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), kurang setuju (skor 3), setuju (skor 4) dan sangat setuju (skor 5).

#### 3.4.2 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Supaya kuesioner teruji validitas serta keandalannya, akan dibutuhkan pengujian model pengukuran. Pada Outer Model ini terdapat tiga komponen penting dalam menjelaskan hubungan antara indikator dengan variabel latennya, sebagai berikut:

##### 1. *Convergent Validity*

*Convergent Validity* model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan variabel laten yang ingin diukur (Ghozali, 2015).

##### 2. *Composite Reliability*

*Composite reliability* mengukur suatu variabel laten yang nilainya harus di atas 0,70. Nilai *composite reliability* di atas 0,70 menunjukkan bahwa semua variabel laten memenuhi kriteria reliabel yang tinggi. Pengukuran AVE dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas *component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reliability*.

Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Ghozali, 2015). *Composite reliability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2015).

#### 3.4.3 Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural pada smartPLS berfungsi untuk mengukur hubungan antar variabel laten baik yang bersifat langsung (*direct effect*) maupun hubungan mediasi (*indirect effect*). Perhitungan model struktural hubungan langsung dan hubungan mediasi bertujuan untuk menghitung besar, arah hubungan serta kemaknaan hubungan. Perhitungan hubungan langsung atau hubungan tidak langsung diperoleh dari nilai koefisien  $\beta$  dan uji hipotesis. Adapun disisi lain terdapat juga perhitungan nilai koefisien determinasi yakni untuk menjelaskan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2015).

#### 3.4.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) bertujuan mengetahui makna hubungan antar variabel laten apakah signifikan (berpengaruh) ataukah tidak signifikan (tidak berpengaruh). Ketentuan suatu hubungan antar variabel laten dikatakan signifikan atau berpengaruh adalah jika nilai probabilitas atau  $p$  value memiliki nilai di bawah level signifikansi 0,5. Sebaliknya suatu hubungan antar variabel laten dikatakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh adalah jika nilai probabilitas atau  $p$  value memiliki nilai di atas level signifikansi 0,5 (Ghozali, 2015).

#### 3.4.5 Uji Mediasi

Uji mediasi bertujuan mengetahui makna hubungan mediasi antar variabel laten apakah signifikan (berpengaruh) ataukah tidak signifikan (tidak berpengaruh). Ketentuan suatu hubungan mediasi dikatakan signifikan atau berpengaruh adalah jika nilai probabilitas atau  $p$  value memiliki nilai di bawah level signifikansi 0,5. Sebaliknya suatu hubungan mediasi dikatakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh adalah jika nilai probabilitas atau  $p$  value memiliki nilai di atas level signifikansi 0,5 (Jogiyanto, 2011).